

JURNAL KOMUNIKASI

Volume 5, Nomor 2, April 2011

ISSN 1907-848X

Halaman 89 - 182

DAFTAR ISI

Editorial

**Etika Komunikasi dalam Kitab *Adab Addunya Waddin*
Karya Al-Mawardi: Sebuah Studi Hermeneutika**

Ahmad Alwajih
(89 - 100)

**Agama dan *Entertainment*:
Fungsi Sosial Media Massa dalam Program Religi di TV**

Monika Sri Yuliarti
(101 - 108)

**Hedonisme Spiritual pada Tayangan Religi:
Analisis Wacana Kritis Program Religi "*Islam Itu Indah*" di TransTV**

Puji Hariyanti
(109 - 128)

**Jurnalistik Online Indonesia:
Analisis Framing Tiga Portal Berita Online di Indonesia**

Mahfud Anshori
(129 - 144)

**Teori *Agenda Setting* dan Citra Pemerintah:
Analisis Pemberitaan Korupsi dan Penurunan Citra Pemerintahan SBY**

Ansor
(145 - 156)

**Keistimewaan Yogyakarta dan Politik Wacana:
Analisis Wacana Visual Media di Ruang Publik**

Kamil Alfi Arifin
(157 - 170)

**Komodifikasi Budaya Lokal dalam Televisi:
Studi Wacana Kritis Komodifikasi *Pangkur Jenggleng* TVRI Yogyakarta**

Sumanri
(171 - 181)

Keistimewaan Yogyakarta dan Politik Wacana: Analisis Wacana Visual Media di Ruang Publik

*Kamil Alfi Arifin*¹

Abstract

Discourse of Yogyakarta's privilege status once was dimmed from public memory. But then it return and people start to re-debate in the political uproar that included grass-roots level, after the President snap it. Discursive battle about this issue does not only appear in mainstream mass media stage, but also in outdoor media. This article tries to reveal the discourse of Yogyakarta's privilege status that is represented in outdoor media, as well as to open up the power-relations behind the production of the discourse.

Keywords:

Yogyakarta's privilege status, political discourse, visual discourse analysis, ideology, outdoor media, subaltern

Pendahuluan

Keistimewaan Yogyakarta adalah sebuah pesona sejarah, yang terukir karena pengorbanan dan kebesaran jiwa salah seorang pemimpin Yogyakarta. Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang kala itu dengan sadar dan sigap memutuskan untuk mengintegrasikan Yogyakarta dengan NKRI yang baru menyatakan diri merdeka dari penjajahan kolonial. Keputusan Sultan disikapi dengan serius oleh Presiden Soekarno. Presiden meneguhkan status keistimewaan Yogyakarta sebagai bentuk imbalannya. Landasan keistimewaan Yogyakarta setidaknya bisa dilihat dalam konstitusi (UUD 1945 pasal 18) yang mengakui adanya daerah yang memiliki hak asal-usul yang dianggap istimewa (*zelfbesturende landschappen*) dan surat-surat politik keduanya.

Tapi waktu tidak diam. Zaman terus melaju mendatangkan hal-hal baru menuntut perubahan atau sesekali memperkarakan sejarah. Carl G. Gustavon (dalam Kuntowijoyo, 2005: 127) mengidentifikasi kekuatan-kekuatan sejarah yaitu, ekonomi, agama, institusi politik, teknologi, ideologi, militer, individu, mitos, budaya, dan lainnya. Kekuatan-kekuatan ini mendorong terjadinya perubahan dalam setiap periode sejarah. Begitu pun dengan sejarah di Yogyakarta. Bergulirnya isu Reformasi pada tahun 1998 –saat Sultan Hamengku Buwono X juga menjadi motornya– tidak hanya berujung pada lengsernya Soeharto, tapi juga melahirkan perubahan UUD 1945 karena kencangnya seruan untuk menanggapi tuntutan isu-isu demokratisasi.

Penelitian oleh LIPI tahun 2009 memberikan isyarat peneguhan akan perlunya UUD 1945 diamandemen. Menurut LIPI, UUD 1945 mengandung cacat bawaan, seperti misalnya minimnya muatan HAM, tiadanya *check and balances*,

¹ Alumnus Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta..

lemahnya *distribution of powers* antara lembaga eksekutif dan legislatif, adanya *executive heavy*, dan kenyataan bahwa selama menggunakan UUD 1945 Indonesia tidak pernah mampu melahirkan pemerintahan yang demokratis (Subekti, 2008: 4).

Tak ayal, tatanan pemerintahan pun dirombak dengan dalih menyesuaikan diri, tak terkecuali tatanan pemerintahan di daerah, termasuk Yogyakarta. Di sini kemudian, Undang-Undang Tentang Keistimewaan Yogyakarta mendesak untuk dibuat. RUU Keistimewaan Yogyakarta pun mulai disusun sejak tahun 2004, meski belum rampung hingga sekarang ini.

Persoalan RUUK Yogyakarta kembali menjadi isu hangat yang diingat kembali oleh publik –selama bertahun-tahun belum selesai– dan seolah-olah menjadi bom wacana yang menghentak setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat terbatas kabinet mengkontraskan monarki dengan demokrasi. Tiba-tiba, polemik terkait keistimewaan Yogyakarta tidak hanya menunjukkan kondisi yang eskalatif, tetapi juga menegangkan. Menegangkan karena ia kemudian menjadi semacam hiruk-pikuk politik yang mendatangkan kegaduhan.

Masyarakat Yogyakarta turun ke jalan, mengobarkan perlawanan, mengibarkan bendera merah-putih setengah tiang tanda duka dan kekecewaan, sembari juga menaikkan bendera “Negeri” Ngayogyakarta Hadiningrat dan spanduk-spanduk perlawanan. Bahkan ada yang mengambil langkah hukum menggugat Presiden SBY (*Warta Keistimewaan*, 20 Februari 2011). Perlawanan masyarakat Yogyakarta ini barangkali lebih heboh dibanding tahun-tahun sebelumnya (*Kompas*, 14 Desember 2010).

Media massa juga tak ketinggalan. Media turut meramalkan, meski bukan tanpa keberpihakan. Mengamati kondisi ini, Dodi Ambardi menuduh bahwa pasar informasi media tidak komplit, karena media cenderung memberikan penekanan yang besar pada mekanisme penetapan (*Tempo*, 20-26 Desember 2010).

Dalam kegaduhan politik itu, publik di Yogyakarta terbelah ke dalam beberapa aras: opsi penetapan, opsi pemilihan langsung, dan opsi pemisahan posisi Gubernur dan Sultan. Jika dikatakan dalam lapangan sosial terdapat ragam kepentingan yang bertikai saling berebut pengaruh dan penerimaan publik (Eriyanto, 2008: 8), maka di sini opsi penetapan menjadi dominan. Ia menjadi pilihan yang amat populer. Opsi penetapan merepresentasikan kelompok masyarakat Yogyakarta yang pro keistimewaan dan penetapan.

Menarik untuk kemudian memperhatikan bagaimana mereka yang pro keistimewaan dan penetapan melakukan produksi wacana melalui spanduk-spanduk, poster-poster, baliho-baliho, bendera-bendera dan meminggirkan “yang lain”, serta membongkar apa motif ideologis-politis di balik gencarnya produksi wacana tersebut. Mengingat, produksi wacana selalu merupakan praktik-praktik ideologis yang selalu melayani kekuasaan (Philips dan Jorgensen, 2007: 140).

Tulisan ini ingin membongkar bagaimana wacana keistimewaan Yogyakarta yang diproduksi dalam media luar, serta membongkar bagaimana relasi-kuasa di balik produksi wacana media luar tersebut.

Metode Penelitian

Dalam penelitian yang menjadi dasar tulisan ini, penulis menggunakan pendekatan analisis wacana yang bersandar pada paradigma kritis. Analisis wacana merupakan analisis yang digunakan untuk melihat pemakaian bahasa, baik dalam tulisan, ujaran, mitos ataupun simbol-simbol lain sebagai praktik sosial (Eriyanto, 2008: 7).

Metode yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah metode analisis wacana visual, dengan merujuk pada kajian Foucauldian dan karya Gillian Rose tentang metodologi visual dalam menginterpretasi materi visual.

Dari kajian Foucault (terutama merujuk pada kajiannya atas lukisan Diego Velasques "*Las Maninas*") setidaknya menunjukkan beberapa langkah metodologis dalam cara kerja analisis wacana visual yang dilakukannya yaitu: 1) Dalam wacana, siapa yang berada dalam pusat kuasa sebuah wacana visual?; 2) Siapa subjek dalam wacana tersebut? Apakah yang berkuasa atau subjek yang lain?; 3) Pengetahuan apa yang diproduksi dalam wacana tersebut?; 4) Bagaimana relasi kuasa dalam gambar, misalnya, relasi spasial?; 5) Bagaimana pola tatapan antara orang dalam gambar? (Al-Qadri, 2011).

Langkah-langkah kerja analisis materi visual menurut Rose terbagi dalam beberapa tahap. *Pertama*, memperhatikan objek secara detail dengan menanggalkan semua asumsi yang mungkin saja muncul dari setiap peneliti. *Kedua*, mengidentifikasi tema kunci dari objek visual yang akan dikaji. *Ketiga*, menjelaskan strategi pembenaran dan efek yang dihasilkannya. *Keempat*, menjelaskan kontradiksi-kontradiksi dalam teks dari sebuah objek visual yang akan dikaji. *Kelima*, melihat pemosisian subjek, baik yang terlihat (*visible*) maupun yang tidak terlihat (*invisible*). *Keenam*, menjelaskan produksi sosial objek yaitu produsen dan lokasi teks; waktu dan tempat serta audiens yang dituju (Rose, 2007: 165-166).

Analisis Teks Media Luar Ruang

1. Pengetahuan

Pada aspek pengetahuan, dari hasil analisis keseluruhan media luar tentang keistimewaan Yogyakarta ditemukan pengetahuan-pengetahuan yang diproduksi dan disampaikan. Pengetahuan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang Presiden SBY dan Partai Demokrat.
SBY mencampuradukkan kekuasaan sebagai Presiden dan pimpinan Partai Demokrat. Wacana keistimewaan Yogyakarta yang belakangan menjadi polemik luas sebenarnya bermula dari kepentingan Partai Demokrat. SBY menggunakan kuasa sebagai Presiden untuk melontarkan wacana tersebut. Karena demikian, SBY dianggap sebagai sumber masalah, sumber bencana bagi Yogyakarta yang akan mendapat balasan dan kutukan. SBY secara umum dianggap bukan Presiden yang baik, maka sepatutnya diganti.
2. Pengetahuan tentang dukungan masyarakat akar rumput
Masyarakat Yogyakarta mendukung secara bulat keistimewaan dan penetapan. Mereka mencintai Sultan dan Paku Alam. Keistimewaan dan

penetapan adalah harga mati. Pedagang pasar, pedagang kaki lima, abdi dalem, dan musisi jalanan, adalah mereka yang mendukung secara penuh keistimewaan dan penetapan. Tidak hanya masyarakat kelas menengah ke bawah yang fanatik mendukung keistimewaan dan penetapan, masyarakat terdidik pun juga mendukung. Upaya dan niat pemerintah pusat mengotak-atik keistimewaan Yogyakarta harus dihentikan. Masyarakat Yogyakarta diwajibkan melakukan perlawanan biar tidak menyesal sampai anak cucu. Bahkan, jika pemerintah pusat tidak mendengar aspirasi masyarakat Yogyakarta yang menginginkan dan konsisten dengan "*Ijab Qabul*", mereka siap untuk referendum.

3. Pengetahuan tentang sejarah Yogyakarta dalam hubungannya dengan NKRI
Sejarah Yogyakarta ditandai dengan integrasi antara Negara Indonesia dengan Kerajaan Yogyakarta. Tetapi integrasi di sini bukan berarti peleburan. Indonesia "melamar" Yogyakarta agar bisa bersatu dalam kesatuan NKRI. Lamaran Indonesia diterima oleh Yogyakarta. Sebagai bentuk imbalan, Yogyakarta yang bersifat kerajaan diakui dan dianggap tidak bertentangan dengan NKRI. Yogyakarta dianggap bagian yang sah dari NKRI, sekalipun tetap menjalankan tata pemerintahannya sendiri. Sehingga keistimewaan yang diberikan Indonesia pada Yogyakarta bukan hasil transaksi politik. Yogyakarta sebagai bagian dari NKRI yang diberikan keistimewaan, dalam keadaan sejahtera dan tenteram. Karena keadaan itu, bagi rakyat Yogyakarta, keistimewaan Yogyakarta menjadi sebuah berkah dan keselamatan. Penting menjaga "pernikahan" Negara Indonesia dengan Negeri Ngayogyakarta berbasis "*Ijab Qabul*". Pemerintah pusat dituntut untuk menghargai sejarah dan rakyat Yogyakarta. Menghargai sejarah dan rakyat Yogyakarta adalah dengan mendukung keistimewaan dan penetapan.

2. Strategi Pembeneran

Pada aspek ini, dari hasil analisis ditemukan strategi-strategi pembeneran yang digunakan untuk meligitimasi pengetahuan-pengetahuan yang diproduksi dan disampaikan. Strategi pembeneran itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, sebagai berikut:

1. *Common Sense*

Produsen teks menggunakan *common sense*, sesuatu yang kebenarannya secara luas diakui oleh publik, sebagai strategi pembeneran dalam menyampaikan suatu pengetahuan. *Common sense* tersebut misalnya: "*Jangan Menghina Kalau Tidak Mau Dihina*", penggunaan kata "Hidup", dan "*Bakal Kuwalat Karo Wong Yogya*".

2. Parodi

Produsen teks menggunakan parodi, ungkapan yang mengandung lelucon segar tapi sekaligus kritis. Parodi tersebut adalah: akronim populer SBY yang diplesetkan menjadi Sumber Bencana Yogyakarta dan penyamaan SBY dengan Gayus Tambunan, salah seorang narapidana koruptor yang belakangan menjadi simbol hipokrisi di Indonesia.

3. **Jargon Ilmiah/Akademis**
Pembenaran akademis salah satunya dilakukan dengan klaim hasil penelitian Laboratorium Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: 1) 96.6% penduduk DIY mendukung Keistimewaan. 2). 97,5% penduduk lulusan perguruan tinggi (PT) mendukung Keistimewaan. 3) 93.2% penduduk DIY mendukung Penetapan Sultan sebagai Gubernur. 4) Penduduk lulusan PT yang mendukung Penetapan adalah sebanyak 94%. 5). Wilayah loyalis Keistimewaan tertinggi ada di Gunung Kidul (96%) dan Bantul (89%).
4. **Dokumen Sejarah**
Strategi pembenaran dalam melegitimasi pengetahuan yang diproduksi dan disampaikan juga menggunakan arsip-arsip berupa surat politik dari Presiden Soekarno pada tanggal 19 Agustus 1945 dan Amanah Sultan Hamengku Buwono IX pada tanggal 5 September 1945.
5. **Klaim ruang publik**
Strategi pembenaran yang masuk ke dalam kategori ini merupakan strategi pembenaran yang dilakukan dengan cara mengklaim kepemilikan atas ruang publik strategis tertentu di Yogyakarta, yaitu klaim atas pasar Beringharjo dan Alun-Alun Kidul.
6. **Generalisasi**
Strategi pembenaran yang masuk ke dalam kategori ini merupakan strategi pembenaran yang dilakukan dengan generalisasi. Hal ini dapat dilihat dari frase "*Masyarakat Yogyakarta Siap Referendum*".

3. Kontradiksi dalam Teks

Dari hasil analisis keseluruhan media luar tentang keistimewaan Yogyakarta ditemukan sejumlah kontradiksi, ketegangan, pertentangan, dan paradoks dalam teks yang dikaji. Kontradiksi tersebut akan dihadirkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.
Kontradiksi dalam Teks

Teks	Kontradiksi
Kata "Piaraan" dan gambar wajah Ruhut Sitompul yang berbadan babi dan Pratikno yang berbadan harimau	Kata "piaraan" mengandaikan hewan peliharaan yang manut pada majikan, sementara babi dan harimau adalah hewan yang relatif susah untuk dijinakkan.
Ganti SBY dengan Gayus, Lebih Sakti, Lebih Berani, Lebih Berkuasa	Mengganti yang buruk dengan yang buruk
Kota Republik	Kota republik menunjukkan dua pengertian yang ambigu. Pertama, kota republik yang dimaksud adalah Yogyakarta bagian dari Republik Indonesia. Kedua, kota republik juga memiliki keterkaitan dengan negara kota (<i>polis</i>)

Teks	Kontradiksi
2). 97,5% Penduduk lulusan Perguruan Tinggi (PT) mendukung Keistimewaan.	Hasil penelitian nomor 2 dan 4 menegaskan bahwa Keistimewaan dan Penetapan didukung oleh masyarakat terdidik (Perguruan Tinggi). Tetapi penelitian nomor 5 justru menunjukkan bahwa wilayah loyalis Keistimewaan tertinggi adalah Gunung Kidul dan Bantul. Gunung Kidul dan Bantul merupakan dua kabupaten yang tingkat pendidikan masyarakatnya rendah. (Dikutip dari data terakhir yang dilansir IRE (<i>Institute for Research and Empowerment</i>). http://www.ireyogya.org/id/program/project-tifa-ire.html)
4). Penduduk lulusan PT mendukung Penetapan 94%.	
5). Wilayah loyalis Keistimewaan tertinggi Gunung Kidul (96%) dan Bantul (89%)	
Kata "Mengkhianati", "Sejarah" dan "Rakyat"	Bagaimana kategori definitif mengkhianati? Sejarah dalam konteks di sini dipahami sebagai warisan. Banyak cara merawat warisan. Sedang rakyat adalah entitas yang tidak diam.
Pasar kami tutup	Pasar adalah ruang publik, sedang kata "kami" adalah kata ganti yang mengandaikan kepemilikan
Hidup Keistimewaan Jogja, Hidup Sultan Paku Alamku, Hidup Pedagang Kaki Lima	Banyak pedagang Kaki Lima tak memiliki tanah
SBY Adigang, Adigung, Adiguna	Kepongahan/kesombongan dilawan dengan kepongahan/kesombongan
Penggunaan kata "Ijab Qabul" dan "Referendum"	Ijab Qabul mengandaikan selesainya persoalan dengan penerimaan. Referendum menunjukkan belum selesainya persoalan dengan penuh penerimaan
Anda Memasuki Wilayah Pro Penetapan	Klaim kepemilikan wilayah Alun-Alun Kidul sebagai ruang publik

4. Subjek yang Diposisikan

Dari hasil analisis ditemukan siapa saja subjek yang diposisikan dalam teks. Subjek-subjek yang diposisikan dalam teks itu terdiri dari dua macam, yaitu subjek yang tampak (*visible*) dan subjek yang tidak tampak (*invisible*). Subjek-subjek yang diposisikan dalam teks itu dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

1. SBY/Pemerintah Pusat, DPR dan Partai Demokrat

Subjek yang diposisikan dalam kategori ini (baik itu subjek yang tampak dan tidak tampak) adalah Presiden SBY, para politisi Partai Demokrat, dan para pembantu SBY yang dianggap merepresentasikan pemerintah pusat ataupun DPR.

2. Sultan dan Paku Alam

Subjek yang diposisikan dalam kategori ini (baik itu subjek yang tampak dan tidak tampak) adalah Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII, serta Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX.

3. Masyarakat akar rumput (*grass-root*)

Subjek yang diposisikan dalam kategori ini (baik yang tampak atau tidak

tampak) adalah masyarakat keseluruhan Yogyakarta baik itu penduduk asli ataupun pendatang di Yogyakarta. Mereka mengorganisir dan menggabungkan diri ke dalam paguyuban, pergerakan, dan komunitas mendukung Keistimewaan Yogyakarta.

Kategori subjek kedua dan ketiga yaitu Sultan, Paku Alam, dan masyarakat akar rumput di Yogyakarta, secara relasional, saling bersekongkol, mendukung, menyatu membangun kekuatan untuk melawan kategori subjek yang pertama yaitu Pemerintah Pusat/SBY, DPR dan Partai Demokrat.

5. Kuasa

Pada aspek kuasa, dari hasil analisis keseluruhan media luar tentang keistimewaan Yogyakarta ditemukan produsen-produsen yang memproduksi teks. Lokasi teks dipasang dan ditempatkan serta kepada siapa teks ditujukan. Produsen-produsen itu dibedakan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1. Gerakan rakyat Yogyakarta

Produsen yang masuk ke dalam kategori ini merupakan organisasi pergerakan yang sengaja dibentuk untuk mendukung keistimewaan Yogyakarta. Produsen-produsen itu adalah: Gerakan Rakyat Mataram Binangun (GRMB), Gerakan Rakyat Mataram (Geram), dan Posko Relawan Keistimewaan.

2. Paguyuban

Produsen yang masuk ke dalam kategori ini di antaranya adalah Ismoyo dan Semar Sembogo (keduanya adalah perkumpulan kepala desa dan dukuh se-Yogyakarta), Komunitas Pedagang Pasar, Komunitas Alkid Musisi, serta Komunitas Pasar Sore Malioboro.

3. Lembaga Akademis

Produsen yang masuk ke dalam kategori ini merupakan lembaga akademis yang memproduksi dan menyampaikan pengetahuan tentang keistimewaan Yogyakarta yang dilakukan dengan cara menurunkan hasil penelitian yang mereka lakukan. Produsen tersebut di antaranya adalah Laboratorium Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sementara lokasi teks, tempat media luar dipasang, secara umum terdapat di beberapa ruang publik strategis di Yogyakarta kota. Lokasi teks tersebut di antaranya: Gedung DPRD Yogyakarta, Jalan Malioboro, depan Gedung Olah Raga dan Pemuda, depan Kantor Pos Lama, Alun-Alun Utara, dan di depan pasar Beringharjo.

Teks dipublikasikan di waktu menghangatnya polemik keistimewaan Yogyakarta paska Presiden SBY mengkontraskan monarki dan demokrasi, terlebih saat menjelang diadakannya sidang paripurna DPRD Yogyakarta untuk membahas keistimewaan Yogyakarta. Penting diketahui, bersamaan dengan diadakannya sidang paripurna, masyarakat Yogyakarta juga mengadakan sidang rakyat. Sedangkan audiens yang dituju di antaranya adalah Partai Demokrat, DPRD, Pemerintah Pusat/Presiden SBY dan masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan.

Wacana Keistimewaan: Kuasa-Kuasa di Balik Wacana

Pada level permukaan, kelompok yang pro penetapan memang terlihat seragam dalam memproduksi wacana tentang keistimewaan Yogyakarta: mereka sama-sama mendukung keistimewaan dan penetapan, meski dibungkus dalam jargon-jargon yang berbeda. Ada yang menggunakan jargon “*Ijab Qabul*” sebagai basisnya, “*Bersatu Bukan Berarti Melebur*”, “*Penetapan Harga Mati*” dan sebagainya. Tapi di balik produksi wacana, yang di permukaan terlihat seragam dan kompak, diduga kuat menyimpan sebuah magma kebencian dan egoisme faksional, seberapapun kadarnya, yang menyiratkan sebuah relasi-kuasa di balik produksi wacana tersebut.

Ada pula motivasi lain yang dapat menjelaskan. Apalagi kalau kita mengingat bahwa dalam sejarah kekuasaan raja Jawa, banyak orang selalu berebut mengambil posisi terdekat di lingkaran raja dan keraton. Itu dilakukan, tidak lain hanya karena alasan pragmatis: dapat tetesan kekayaan dan martabat sosial.

Tampaknya, hal tersebut juga masih relevan dalam konteks kekinian. Dalam penelitiannya, Adhi Darmawan, memetakan faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan mengapa lahir kelompok pro keistimewaan dan penetapan. Adhi menegaskan, salah satu faktornya adalah balas budi (2007: 179). Penelitian Adhi ini semakin meneguhkan bahwa memang ada patron-klien dalam kegiatan mendukung keistimewaan dan penetapan ini. Gerakan mendukung keistimewaan dan penetapan, tidak seluruhnya dibangun dari inisiatif masyarakat bawah, melainkan bersifat *top-down*. Hal ini bisa dilihat, misalnya, dari paguyuban Semar Sembogo yang merupakan forum lurah. Lurah bisa saja secara struktural menginstruksikan kepada jajaran perangkat desanya untuk mendukung keistimewaan dan penetapan.

Relasi kuasa lain yang terdapat di balik produksi wacana keistimewaan dan penetapan adalah soal perizinan pemasangan media luar (spanduk, baliho, poster dsb), yang dijadikan dan dipilih oleh kelompok pro penetapan sebagai strategi berwacana mereka. Pemasangan media luar, yang dilakukan oleh kelompok pro penetapan di ruang-ruang publik strategis Yogyakarta belum mengantongi izin. “*Nggak ada izin,*” kata Bambang Sunarto, aktivis GRMB (Wawancara, 8 Juli 2011). Dengan pernyataan yang senada, Wiwin Sunarto, koordinator Posko Relawan juga mengiyakan: “*Tidak izin, nggak apa-apa kok*” (Wawancara, 6 Juli 2011). Ketika peneliti mengecek silang ke bagian pelayanan perizinan penyelenggaraan reklame di kantor walikota Yogyakarta, ternyata memang pemasangan media luar (spanduk, baliho, poster dan bendera) yang dipasang oleh gerakan pendukung keistimewaan dan penetapan tidak memiliki izin.

Padahal, berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame, setiap orang atau instansi yang hendak memasang reklame, termasuk di dalamnya spanduk, poster, baliho, dan sebagainya, harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah (Lihat bab II pasal 2). Mekanisme atau prosedur resmi perizinannya pun di atur sedemikian rupa.

Dalam peraturan yang sama, bab III pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa untuk mendapatkan izin penyelenggaraan reklame harus memenuhi syarat-syarat yang di antaranya sebagai berikut: a) mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala

Daerah dengan menggunakan blangko yang disediakan; b) dilengkapi gambar-gambar teknis atau surat-surat lain yang diperlukan. Tidak hanya itu, reklame yang dianggap mengganggu keindahan, ketertiban, kenyamanan, dan rasa sulila, lebih-lebih tidak mengantongi izin maka Kepala Daerah berhak untuk membongkar mencabut atau menurunkannya (Lihat bab III pasal 8 dan bab IV pasal 14 ayat 1). Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame juga ditegaskan mengenai kewajiban memiliki izin (lihat bab II pasal 2) dan mekanisme perizinan (lihat bab III pasal 3 dan bab V pasal 6). Peraturan di atas menunjukkan bahwa tidak boleh ada orang atau instansi manapun yang memasang reklame secara sembarangan.

Pemasangan media luar yang dilakukan oleh kelompok pro penetapan yang tanpa izin itu tentu menyalahi aturan pemerintah daerah dan kota. Karena segala bentuk media luar, baik itu komersil ataupun layanan masyarakat, harus mengantongi izin terlebih dahulu dari yang berwenang. Tanpa itu bisa dianggap ilegal. Namun sepertinya ada semacam pembiaran yang sengaja dilakukan oleh pemerintah kota dan daerah. Ini menjadi mudah ditebak, karena media luar yang dipasang menguntungkan Sultan yang menjabat sebagai pemimpin daerah.

Terdapat relasi kuasa bahwa Sultan dan walikota memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin daerah dan kota melanggar peraturan tata ruang kota untuk kepentingan yang menguntungkan dirinya. Jelas, di sini, kelompok pro keistimewaan dan penetapan dari masyarakat akar rumput (*subaltern*) di Yogyakarta tidak bergerak sendirian dalam mewacanakan keistimewaan Yogyakarta.

Terdapat sinyal dukungan dari keraton sebagai *state apparatus* dalam bentuk-bentuk yang sudah disebut di atas (baca: pembiaran pemasangan media luar, penyediaan ruang yang tak terbatas, dan sebagainya). Sebab, bagaimanapun keraton membutuhkan subjek politik dalam pewacanaan keistimewaan. Kebutuhan akan subjek politik menjadikan keraton menginterpelasi gerakan pro keistimewaan dan penetapan melalui berbagai macam teknik termasuk penyediaan ruang.

Salah seorang aktivis GRMB, Bambang Sunarto menyatakan bahwa memang gerakan-gerakan pendukung keistimewaan dan penetapan menjaga komunikasi dengan keraton. Tapi lebih jauh, Bambang juga menambahkan, komunikasi antara gerakan-gerakan pendukung keistimewaan dan penetapan bersifat koordinatif. "Kita selalu komunikasi dengan keraton, tapi itu koordinasi bukan komando. Kita tidak *ngemis-ngemis* minta dana. Kita mengajukan program. Keraton membantu program," tegasnya (Wawancara, 8 Juli 2011).

Koordinator lapangan Posko Relawan Keistimewaan, Wiwin Winarto, juga menegaskan sekalipun dia membantah tudingan Posko Relawan didukung oleh keraton. Tapi dia mengakui bahwa pihak keraton mengetahui keberadaan Posko Relawan Keistimewaan. "Orang keraton tahu," kata Wiwin (Wawancara, 6 Juli 2011).

Subaltern dalam Wacana Keistimewaan Yogyakarta: Menimbang Kembali Pemikiran Spivak

Dalam polemik keistimewaan Yogyakarta, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan sebelumnya, terdapat kelompok-kelompok yang bertikai secara kewacanaan, tidak hanya di panggung media *mainstream* dan dikuasai para elit.

Melainkan juga mengambil medan perjuangan diskursif lain hampir di semua ruang publik strategis di Yogyakarta dan menjadi konsumsi semua masyarakat, tak terkecuali masyarakat akar rumput. Hal ini bisa dilihat dari media luar yang dikaji dalam penelitian ini.

Secara kategorial, kelompok-kelompok yang bertikai secara kewacanaan tersebut di atas menarik jika direfleksikan dengan pemikiran Gayatri Spivak tentang studi *subaltern*. Kelompok yang kontra penetapan dan keistimewaan Yogyakarta (terlebih Pemerintah Pusat, Partai Demokrat dan DPR) dalam refleksi pemikiran Spivak tentang *subaltern*, jelas merupakan elit (*Kompas*, 12 Maret 2006). Terminologi elit tentu merujuk kepada sesuatu yang memiliki akses yang memadai pada kekuasaan. Sementara terminologi *subaltern* sebaliknya, ia menunjuk sesuatu yang tak memiliki akses yang memadai pada kekuasaan. Mereka adalah kaum yang tersubordinasi, yang selalu berada di tepi batas kekuasaan (Guha, 2003: 305).

Mereka yang kontra penetapan dan keistimewaan Yogyakarta (baca: Pemerintah Pusat, Mendagri dan DPR) memiliki kekuasaan seperti merumuskan dan menetapkan Undang-Undang (dalam hal ini, RUUK Yogyakarta). Sekalipun mereka tidak memiliki kekuasaan mutlak, karena kekuasaan selalu terbatas dalam negara demokrasi yaitu adanya pembagian kekuasaan dan mitos perwakilan (Huda, 2004: 114-115). Tapi bagaimanapun, dalam pemikiran Spivak, mereka merefleksikan karakter-karakter kaum elit. Sementara kaum *subaltern*, seharusnya adalah lawan mereka: kelompok yang pro penetapan dan keistimewaan Yogyakarta yang notabennya adalah masyarakat akar rumput di Yogyakarta.

Persoalan tentang elit versus massa memang menjadi problema-problema inti dalam kajian sosiologi dan ilmu politik. Meski ada dilema yang dihadapi massa yaitu kesadaran bahwa massa juga memerlukan kepemimpinan, yang pada tingkat tertentu, juga potensial melahirkan elit-elit baru (Wertheim, 2009: 2). Di sini, posisi *subaltern* dan elit mulai terlihat menjadi kabur. *Subaltern* dan elit menjadi posisi yang tidak ajeg. Karena dalam masyarakat relasi-relasi itu selalu mengalami gerak-geser yang begitu cepat dan kadang tak menentu.

Dalam konteks polemik keistimewaan Yogyakarta, pemikiran Gayatri tentang *subaltern* juga menunjukkan hal yang serupa. Elit yang seharusnya diandaikan sebagai sesuatu yang memiliki akses kepada kekuasaan (dalam hal ini pemerintah pusat) adalah superior. Sementara *subaltern* diandaikan sebagai massa yang lemah dalam hubungannya dengan pemerintah dan negara adalah inferior, tidak begitu sepenuhnya dalam pertikaian kewacanaan keistimewaan Yogyakarta.

Para elit dalam pusran polemik keistimewaan Yogyakarta mengalami keterpecahan dalam alam demokrasi. Yang satu menganggap demokrasi melulu formal dan tunggal. Yang lainnya menganggap demokrasi harus mampu mengakomodir dan menyerap praktik budaya yang sudah menyejarah, meski yang terakhir ini seringkali mendapat tuduhan monarki, feodal, dan otomatis bertentangan dengan demokrasi. Masing-masing kubu ini, pada praktiknya, saling bergerak menghimpun dukungan dari massa rakyat. Maka dalam proses menarik dan menghimpun dukungan tersebut, mereka para elit itu menginterpelasi, melakukan pemanggilan ideologis, terhadap massa rakyat di Yogyakarta.

Jika dibayangkan massa Yogyakarta dalam hubungannya yang antagonistik dengan pemerintah pusat sebagai “yang seharusnya inferior”, karena massa Yogyakarta tidak punya akses pada kekuasaan, ternyata tidak sepenuhnya benar. Justru, massa Yogyakarta (khususnya kelompok pro penetapan dan keistimewaan Yogyakarta) bertindak lebih superior secara kewacanaan, dan bahkan meminggirkan kelompok-kelompok yang lain. Kelompok yang kontra penetapan dalam ruang publik strategis di Yogyakarta tidak demonstratif, tidak berani bahkan cenderung malu-malu untuk memperjuangkan pandangan politiknya. Mereka tidak bisa dan takut untuk bicara.

Tapi benarkah *subaltern* dalam konteks keistimewaan Yogyakarta benar-benar mampu berbicara, bahkan dengan begitu lantangnya? Jangan-jangan mereka mampu lantang bicara karena memang dibantu keraton sebagai *state apparatus* melalui pembiaran dan penyediaan ruang sebagaimana disinggung di atas?

Penyediaan ruang adalah pemberian akses. Keraton sebagai bagian dari *state apparatus* mengalami keterpecahan karena tingkat kegaduhan polemik keistimewaan yang dilemparkan Pemerintah Pusat dilihat sebagai sesuatu yang potensial mengancam dirinya. Sehingga kebiasaan *subaltern* (baca: kelompok pro keistimewaan Yogyakarta dan penetapan) berbicara lantang tentang keistimewaan Yogyakarta dan mekanisme penetapan sepatutnya kembali diragukan.

Penutup

Setelah melakukan analisis terhadap media luar ruang (spanduk, baliho, poster dan bendera) tentang status keistimewaan Yogyakarta di ruang-ruang publik strategis Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa kelompok pro keistimewaan dan penetapan, secara kewacanaan dalam ruang publik, lebih bertindak superior dan meminggirkan kelompok-kelompok yang lain. Kelompok ini juga melakukan pembakuan-pembakuan pengetahuan tentang keistimewaan Yogyakarta melalui strategi berwacana yang memanfaatkan media luar.

Beberapa pengetahuan yang mereka produksi di antaranya pengetahuan tentang dukungan masyarakat akar rumput dan pengetahuan tentang sejarah Yogyakarta dalam hubungannya dengan NKRI. Sebagai pembenaran atas pengetahuan yang diproduksi, mereka menggunakan strategi pembenaran berupa *common sense*, parodi, jargon ilmiah/akademis, dokumen sejarah, klaim ruang publik dan generalisasi.

Relasi kuasa yang ditemukan dalam kajian ini adalah pembiaran pemasangan media luar yang belum mengantongi izin. Ada relasi kuasa antara Sultan sebagai pemimpin daerah, walikota, dan gerakan-gerakan pendukung keistimewaan dan penetapan. Gerakan pro keistimewaan dan penetapan yang notabene diruaki masyarakat akar rumput (*subaltern*) Yogyakarta ternyata tidak bergerak sendiri, terdapat sinyal dukungan dari keraton sebagai bagian dari *state apparatus* yang mengalami keterpecahan. Keraton melakukan proses interpelasi yang dilakukan dengan berbagai macam teknik, termasuk pembiaran media luar yang tanpa izin dan penyediaan ruang.

Dalam pemikiran Gayatri Spivak, pemisahan kaum elit dan *subaltern* begitu tegas. Keduanya memiliki posisi yang kontras, saling meniadakan dan bersifat antagonistik satu sama lain. Bahkan, *subaltern*, bagi Spivak dianggap tidak mampu berbicara. Tetapi dalam konteks polemik keistimewaan Yogyakarta, *subaltern* (baca: kelompok pro keistimewaan Yogyakarta dan penetapan) menghadirkan dirinya seolah-olah tampak mampu berbicara bahkan dengan begitu lantang.

Pada praktik tertentu dalam masyarakat posisi kaum elit dan *subaltern* tidak selalu ajeg, melainkan kadang tampak begitu kabur. Dalam konteks polemik keistimewaan Yogyakarta, kaum elit mengalami keterpecahan dalam alam demokrasi. Yang satu menganggap demokrasi sebagai sesuatu yang melulu tunggal dan formal. Yang lain, menganggap demokrasi harus mampu mengakomodir praktik-praktik budaya yang menyenarai dan nilai-nilai masyarakatnya. Kedua kubu itu saling mencari dukungan massa rakyat, mereka melakukan interpelasi. Di sini, *subaltern* dalam wacana keistimewaan Yogyakarta yang seolah-olah tampak mampu berbicara bahkan dengan begitu lantang, diinterpelasi oleh kaum elit yang mengalami keterpecahan tersebut yaitu pihak keraton.

Kajian ini memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan melakukan analisis di balik proses produksi wacana keistimewaan Yogyakarta dalam media luar secara lebih mendalam. Terutama mengenai sumber pendanaan gerakan-gerakan pendukung keistimewaan dan penetapan sebagai produsen media luar tentang keistimewaan Yogyakarta dan hubungan mereka dengan keraton.

Kajian berikutnya mengenai tema ini sebaiknya melakukan analisis lebih mendalam soal proses-proses di balik produksi wacana keistimewaan melalui media luar, terlebih soal sumber pendanaan dan hubungan produsen media luar dengan keraton. Selain itu, juga bisa dilakukan penelitian analisis wacana historis keistimewaan Yogyakarta dengan teks media sebagai objek kajiannya.

Daftar Pustaka

- Al-Qadri, Ridha. *Foucault dan Wacana Visual*. Makalah Pelatihan Analisis Wacana Visual di Program Studi Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Tidak diterbitkan.
- Ambardi, Dodi. 2010. "Untung Rugi Opsi Penetapan". *Tempo*, edisi 20-26 Desember 2010.
- Artha, Arwan Tuti. 2009. *Laku Spiritual Sultan: Langkah Raja Jawa Menuju Istana*. Yogyakarta: Galangpress.
- Atmakusumah, dkk. 1982. *Tahta Untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX*. Jakarta: Gramedia.
- Beverly, Jhon. 1998. "Theses on *Subalternity*, Representation, and Politics". *Postcolonial Studies*, Vol 1, No 3.
- Darmawan, Adhi. 2010. *Jogja Bergolak: Diskursus Keistimewaan DIY dalam Ruang Publik*. Yogyakarta: KEPEPress.
- Eriyanto. 2008. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.

- Hartiningsih, Maria dan Ninuk Mardiana Pambudy. 2006. "Membaca Gayatri Chakravorty Spivak". *Kompas*, 12 Maret 2006.
- Jorgensen, Marianne W dan Philips, Louise J. 2007. *Analisis Wacana: Teori dan Metode*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kompas*, 14 Desember 2010. Dalam berita "Yogyakarta Tentukan Sikap".
- Kuntowijoyo. 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang.
- Majalah *Tempo*, "Hip Hop di Halaman Keraton". Edisi 20-26 Desember 2010.
- Rose, Gillian. 2007. *Visual Methodologies: An Introduction to The Interpretation of Visual Materials*. London: SAGE Publications.
- Subekti, Valina Singka. 2008. *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sutrisno, Mudji dan Putranto, Hendar. 2004. *Hermeneutika Pascakolonial, Soal Identitas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Warta Keistimewaan*, "Inilah Alasan Gugat SBY". Edisi 05, Senin 28 Februari 2011.
- Wertheim, W.F. 2009. *Elit dan Massa*. Yogyakarta: Resist Book bekerja sama dengan Libra (Lingkar Belajar Reforma Agraria).

